

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Pajak merupakan penerimaan pendapatan terbesar dari masyarakat atau warga negara yang diterima oleh pemerintah Indonesia (Caroko dkk., 2015). Sebagai negara yang berkembang Indonesia masih terus melakukan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan akan terlaksana apabila terdapat dana yang tersedia (Parera dan Erawati, 2017). Sumber pendanaan salah satunya berasal dari hasil pungutan pajak kepada warga negara. Kebutuhan akan sumber dana yang besar membuat pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Undang-undang yang dianut oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1994 adalah *self assessment*. *Self assessment* merupakan sistem dimana Wajib Pajak bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, memotong, memungut dan melaporkan pajak yang terutang kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Herryanto dan Toly, 2013). Penggunaan sistem *self assessment* yang dianut pemerintah Indonesia akan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak melakukan semua kewajiban perpajakannya sendiri.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dalam pemenuhan kewajibannya masih dalam kondisi yang rendah, hal ini disebabkan Wajib Pajak yang sudah terdaftar tidak melaporkan kewajibannya yaitu melaporkan SPT

(Avianto dkk., 2016). Kepatuhan Wajib Pajak secara terminologi berarti taat dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila taat dan disiplin dalam memenuhi dan melaksanakan segala kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. (Faizin dkk., 2016). Menurut Ardiyansyah dkk. (2016) kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih sedikit Wajib Pajak yang menyampaikan SPT.

**Tabel.1.1 Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d 2016**

No	Uraian/tahun	2013	2014	2015	2016
1	Wajib pajak terdaftar	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.215
2	Wajib pajak terdaftar wajib SPT	17.731.736	18.357.833	18.357.833	18.159.840
3	Realisasi SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.735.463
4	Rasio kepatuhan	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%

Sumber: Lakin DJP 2016

Berdasar tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pelaporan SPT masih rendah dibanding Wajib Pajak terdaftar wajib SPT. Menurut Dirjen pajak rendahnya realisasi penyampaian SPT disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak. Usaha untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memaksimalkan faktor yang mempengaruhinya. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sosialisasi, pelayanan dan sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi Wajib

Pajak dari luar diri Wajib Pajak. Faktor eksternal didapat Wajib Pajak dari pengalaman yang telah diterima dan dapat dari pengamatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sedangkan Faktor internal dari kepatuhan Wajib Pajak dapat berupa pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak (Dirjen pajak, 2016).

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) melakukan penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak di Surabaya. Wajib Pajak Orang Pribadi dipilih sebagai objek penelitian. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan semua variabel yaitu kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Veronica (2015) tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian dilakukan di Senapelan, Pekanbaru. Penelitian tersebut menunjukkan hasil variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel pelayanan, pengetahuan perpajakan, persepsi pengetahuan korupsi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Suryadi dkk.(2016) dengan penelitiannya di KPP Pratama Singosari. Suryadi dkk.(2016) menggunakan variabel sosialisasi, sanksi, tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi secara bersamaan memengaruhi secara signifikan. Variabel yang paling dominan adalah sanksi.

Penelitian ini berfokus pada faktor eksternal yaitu sosialisasi, pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Lokasi penelitian yaitu di KPP Pratama Blitar. Peneliti memilih KPP Pratama Blitar karena berdasar penelitian yang dilakukan Ardiyansyah dkk.(2016) terdapat indikasi kepatuhan Wajib Pajak di Blitar masih rendah dan memilih Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai objek penelitian. Berdasarkan kondisi tersebut maka penelitian ini akan mengkaji tentang pengaruh sosialisasi, pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Blitar.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

Apakah ada pengaruh sosialisasi, pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Blitar ?

### **C. Pembatasan Masalah**

1. Peneliti membatasi masalah hanya pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
2. Penelitian dilakukan dalam periode enam bulan.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Menganalisis apakah ada pengaruh sosialisasi, pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Blitar.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak KPP Pratama Blitar sebagai referensi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Untuk Wajib Pajak, penelitian ini dapat digunakan untuk membangkitkan rasa sadar akan kewajiban perpajakannya yang selama ini masih rendah.
- c. Bagi akademisi yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi.